

Konsep Kewarganegaraan Multikultural dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah

Dellawati¹, Dhimas Rega Pradana², Sunarto³, Gama Setyazi⁴

¹²³⁴ Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: dellawati220@gmail.com, dhimasrega83@gmail.com, sunarto.ind@gmail.com,
gamasetyazi190799@gmail.com

Abstrak

Konflik horizontal yang memiliki potensi negatif tersebut, pada umumnya bersifat konflik tidak produktif akibat perbedaan sikap politik pada pesta demokrasi. Tentu sebagai bangsa yang beradab kita perlu prihatin atas fenomena tersebut, karena bangsa Indonesia, dikenal dengan persatuan serta toleransinya yang kuat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Konsep Kewarganegaraan Multikultural dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah, metode penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif, dengan metode studi literatur. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan “rasionalisasi” mengenai pentingnya mengoptimalkan keberadaan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan dan pembelajaran multikultural. Hasil penelitian ini adalah multikultural merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita perlu menerima bahkan merawat kemultikulturalan tersebut dengan penuh komitmen dan kesadaran. Tentu sikap tersebut membuktikan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, serta merepresentasikan warga negara yang baik dan cerdas. Pendidikan kewarganegaraan sangat relevan untuk berperan sebagai pendidikan multikultural. Selain didukung oleh tujuan serta struktur keilmuannya yang jelas berfokus pada upaya untuk menjaga kemultikulturalan atau kemajemukan bangsa, guna meminimalisir praktik-praktik yang mengarah pada ketidakadilan, kekerasan, konflik horizontal, penindasan serta diskriminasi. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultural pun memberikan landasan teori serta informasi argumentatif agar peserta didik memiliki pemahaman mumpuni mengenai filosofi, substansi serta pentingnya menjaga kemultikulturalan bangsa. Sehingga secara sukarela mengaplikasikan pemahamannya tersebut dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.

Kata kunci: Multikultural, Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Menengah

Abstract

Horizontal conflicts that carry negative potential are generally unproductive conflicts arising from differences in political attitudes during democratic events. As a civilized nation, we should be concerned about this phenomenon, because Indonesia is known for its strong unity and tolerance. This study aims to examine the concept of multicultural citizenship in Civic Education learning at the secondary school level. The research employs a qualitative approach using a literature study method. The purpose of this study is to provide a “rationalization” of the importance of optimizing the role of Civic Education as multicultural education and learning. The results of this study indicate that multiculturalism is a gift from God Almighty; therefore, it must be accepted and nurtured with full commitment and awareness. Such attitudes demonstrate faith and devotion to God Almighty and represent good and intelligent citizens. Civic Education is highly relevant to serve as multicultural education, supported by its objectives and scientific structure that clearly focus on maintaining the multicultural and pluralistic nature of the nation in order to minimize practices leading to injustice,

violence, horizontal conflict, oppression, and discrimination. Civic Education as multicultural education also provides theoretical foundations and argumentative information so that students develop a comprehensive understanding of the philosophy, substance, and importance of preserving national multiculturalism. Consequently, students are encouraged to voluntarily apply this understanding in their daily lives.

Keywords: Educational technology, Islamic Religious Education

Artikel Info:

Submit : Desember 2025

Revisi : Desember 2025

Terima : Desember 2025

Cite :

Dellawati et al. (2025). Konsep Kewarganegaraan Multikultural dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah. *Journal of Educational Research and Community Service (JERCS)*, 2(1), 11-18.

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu pembelajaran yang berfokus dalam membentuk warga negara Indonesia yang baik dan cerdas. Dengan tujuan mulia tersebut serta untuk menjawab kebutuhan zaman, membuat Pendidikan Kewarganegaraan menjadi keilmuan yang memiliki pendekatan interdisipliner multidisipliner, bahkan transdisipliner. Selaras dengan Kariadiyang menegaskan bahwa “pendidikan kewarganegaraan apabila ditinjau dari perspektif kurikulum pendidikan berwawasan global, serta untuk mengatasi kemajuan zaman, maka kurikulumnya perlu bersifat interdisipliner, multidisipliner, serta transdisipliner”. Tidak bisa dimungkiri berbagai potensi ancaman baik yang bersifat internal maupun eksternal, turut membuat kajian perkembangan ilmu dan pengetahuan di Indonesia, khususnya yang berorientasi pada pembentukan karakter warga negara, semakin dinamis dan kompleks, karena sebagai bentuk sumbangsihnya dalam menjaga keberlangsungan hidup bangsa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Realita bangsa Indonesia yang multikultural merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tidak bisa diganggu gugat. Tentu fakta kemajemukan bangsa tersebut, perlu menjadi ketahanan bahkan kekuatan nasional Indonesia, dalam upaya untuk menjadi negara maju serta menjadi bangsa yang disegani. Tidak bisa dimungkiri, konflik horizontal, kekerasan SARA serta diskriminasi yang terjadi akhir-akhir ini, berpotensi untuk membawa bangsa Indonesia menuju jurang kehancurannya. Sehingga perlu adanya upaya yang terukur dan sistematis dalam menginternalisasikan pemahaman untuk hidup damai, makmur saling menyayangi, menghormati, bahkan saling melindungi, sebagai bentuk nyata dari peran warga negara yang baik dan cerdas dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia.

Konflik horizontal yang memiliki potensi negatif tersebut, pada umumnya bersifat konflik tidak produktif akibat perbedaan sikap politik pada pesta demokrasi. Tentu sebagai bangsa yang beradab kita perlu prihatin atas fenomena tersebut, karena bangsa Indonesia, dikenal dengan persatuan serta toleransinya yang kuat. Idealnya perbedaan pada pilihan politik cukuplah disikapi secara dewasa serta bijaksana, agar tidak melahirkan konflik yang tidak perlu. Jamaludin menjelaskan bahwa secara sosial pemilu sangat rawan akan terjadinya konflik horizontal, sehingga kecerdasan masyarakat begitu diperlukan untuk mengatasi potensi konflik tersebut, dengan moralitas yang tinggi.

Nyatanya konflik horizontal yang mengancam integrasi nasional, keberagaman atau kemultikulturalan bangsa tidak selalu lahir dari perbedaan pilihan politik. Tetapi juga dari

kecerdasan serta kedewasaan warga negara itu sendiri. Bangsa Indonesia memiliki karakteristik yang unik, selain percaya terhadap karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, bangsa ini pun percaya pada semangat persatuan yang kokoh, untuk menjadi modal sosial dalam meraih kemerdekaannya, serta sebagai bekal dalam upayanya untuk menjadi negara yang berkarakter dan maju. Selaras dengan Lestari yang menegaskan bahwa semangat persatuan Indonesia sebagai bangsa multikultural merupakan identitas nasional, yang harus diwariskan secara sistematis, agar Indonesia tetap eksis.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode studi literatur. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan “rasionalisasi” mengenai pentingnya mengoptimalkan keberadaan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan dan pembelajaran multikultural. Tentu dilakukannya upaya tersebut bertujuan untuk memberikan informasi argumentatif, guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan didukung oleh fakta bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pembelajaran yang dimandatkan oleh konstitusi untuk membentuk warga negara Indonesia yang baik dan cerdas, serta paham akan hak dan kewajibannya, bahkan didukung oleh aspek materi keilmuan pendidikan kewarganegaraan yang sangat relevan untuk dioptimalkan sebagai pendidikan multikultural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Multikultural

Multikulturalisme berasal dari kata multi yang berarti banyak, dan kultur yang berarti budaya, dan isme artinya aliran atau paham. Irwan mengemukakan bahwa Multikulturalisme sebagai sebuah paham yang menekankan pada kesedarajatan dan kesetaraan budaya-budaya lokal tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya yang ada. Dengan kata lain, penekanan utama multikulturalisme adalah kesetaraan budaya. Pendapat lain diungkapkan oleh Naim & Sauqi yang berpendapat bahwa “Multikulturalisme merupakan sebuah paham atau situasi kondisi masyarakat yang tersusun dari banyak kebudayaan. Multikulturalisme sering merupakan perasaan nyaman yang dibentuk oleh pengetahuan”. Istilah multikulturalisme ini juga sering dipahami sebagai Plural society yang diperkenalkan oleh JS Furnival. Menurut Furnival mengemukakan bahwa “masyarakat plural adalah masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih unsur-unsur atau tatanan-tatanan sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak bercampur dan menyatu dalam satu unit politik tunggal”.

Masyarakat multikultural merupakan komunitas atau kelompok-kelompok yang secara kultural, ekonomi dan politik terpisah-pisah serta memiliki struktur kelembagaan yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya, atau dengan kata lain merupakan suatu masyarakat di mana sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagiannya adalah sedemikian rupa sehingga para anggotanya kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan. Dengan adanya pemahaman seperti itu, setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Keberagaman di Indonesia saat ini belum dipahami oleh segenap warga masyarakat sebagai suatu given, takdir Tuhan, dan bukan faktor bentukan manusia. Andersen dan Crusher mengemukakan bahwa pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan

sebagai pengenalan dan pemahaman mengenai kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia ini. Pemikiran tersebut diungkapkan pula oleh Freire.

Pendidikan bukan merupakan “menara gading” yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Pendidikan, menurutnya harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya mengagungkan prestise sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya. Pendidikan berbasis multikultur merupakan sebuah perspektif yang mengakui realitas politik, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan yang kompleks dan beragam (plural) secara kultur. Sudah seharusnya pendidikan Indonesia memberikan pendidikan yang mengedepankan sikap demoratis.

Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (civics education) merupakan konsep yang pada awal mulanya digunakan oleh bangsa Yunani, yang dikenal dengan istilah Civics, yang berasal dari bahasa Latin yaitu *civicus* yang artinya penduduk dari sebuah kota. Wuryan, S. & Syaifullah mengemukakan bahwa pelajaran civics mulai diperkenalkan pada tahun 1970 dalam rangka mengamerikakan bangsa Amerika (nation building), sebab bangsa Amerika terdiri dari bermacam-macam suku, bangsa ras, maupun etnik. Usaha ini dikenal dengan “Theory of Americanization”. Lebih lanjut Wuryan, S. & Syaifullah mengemukakan bahwa: Pada mulanya pelajaran civics ini hanya membahas “government” atau pemerintahan saja, namun sejalan dengan perkembangan masyarakat yang tidak puas dalam hal ini, muncul gerakan *community civic* pada tahun 1907 yang dipelopori oleh W.A. Dunn. Maksud dari gerakan tersebut adalah agar civics lebih fungsional dalam menghadapi siswa pada lingkungan atau kehidupan sehari-hari dengan ruang lingkup lokal, nasional dan internasional. Pengertian lain yang berbeda diungkapkan oleh Carter Van Good yakni civics adalah “the element of political science of that branch of political science dealing with the rights and duties of citizens”. Berdasarkan definisi tersebut civics merupakan bagian atau elemen dari ilmu politik atau cabang dari ilmu politik yang berisi tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban warganegara.

Dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa istilah civics merujuk pada sebuah konsep pembelajaran yang mengedepankan masalah pemerintahan dan pada awal mulanya pembelajaran civics di Amerika bertujuan sebagai penanaman sikap nasionalisme bangsa Amerika yakni dengan mengamerikakan bangsa Amerika (nation building). Dan juga sebuah pembelajaran mengenai hak dan kewajiban warga negara, namun istilah civics kemudian berganti dengan istilah civics education, seperti yang diungkapkan oleh Budimansyah & Suryadi bahwa “masih pada tahun 1900-an, munculah istilah “civics Education” sebagai istilah baru, yang juga digunakan secara tukar-pakai dengan istilah “citizenship education”. Dimana menurut Mahoney yang dikutip oleh Soemantri bahwa “civics education merupakan suatu proses pembelajaran semua mata pelajaran, kegiatan siswa, proses administrasi, dan pembinaan dalam upaya mengembangkan perilaku warganegara yang baik”.

Berkenaan dengan Civics Education, pendapat lain sebagaimana dikemukakan oleh Branson yang mengemukakan bahwa “Civics Education dalam demokrasi adalah pendidikan untuk mengembangkan dan memperkuat dalam atau tentang pemerintah otonom (Self Government). Pemerintahan otonom demokratis berarti bahwa warganegara aktif terlibat dalam pemerintahannya sendiri”. Di Indonesia sendiri pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib yang harus dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan juga pendidikan tinggi. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Sistem

Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, pada pasal 37. Dimana istilah dari pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia berubah-ubah hal ini berkaitan dengan pemerintah dan kebijakan politik dari pemerintah itu sendiri yang mengharuskannya berganti-ganti.

Menurut kurikulum 1994 mengartikan pendidikan kewarganegaraan sebagai: “.mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia, nilai luhur dan moral tersebut diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa”. Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya bermuara untuk dapat menghasilkan luaran (Output) berupa peserta didik sebagai warga negara yang baik (good citizenship), yang meliputi pengetahuan akan hak dan kewajiban, serta baik secara karakter, etika, serta tanggung jawab dan demokratis.

Peran Keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Pemahaman Peserta didik sekolah menengah Akan Pentingnya Menjaga Kemultikulturalan Bangsa.

Sebagai konsep pembelajaran yang berfokus pada upaya peningkatan kapasitas spiritual, intelektual dan emosional peserta didik, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki ruang lingkup kajian yang komprehensif, guna menjawab kebutuhan serta tantangan zaman. Dalam konteks substansi materi keilmuan pendidikan kewarganegaraan, tentu pada umumnya mengarah pada kajian ideologi Pancasila, bela negara, sosial dan politik, nilai dan moral, kemultikulturalan, hukum dan demokrasi, konstitusi dan ketatanegaraan, hubungan internasional, hak asasi manusia dan kebebasan pers, kebudayaan dan kearifan lokal, pertahanan dan keamanan nasional serta substansi materi lainnya yang relevan dengan tujuan serta kajian pendidikan kewarganegaraan.

Diperkuat oleh yang menjelaskan bahwa “ruang lingkup atau substansi materi pada keilmuan pendidikan kewarganegaraan, berfokus pada Pancasila, UUD 1945, demokrasi, nilai, etika, moral, politik, hukum, kebudayaan, kearifan lokal serta kemajemukan bangsa”. Tentu substansi materi mengenai kemultikulturalan bangsa Indonesia, selain menjadi kajian penting juga sebagai modal akademik yang mampu merubah cara pandang peserta didik terhadap fenomena kemultikulturalan atau keberagaman bangsa. Secara filosofi kemultikulturalan bangsa Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga realita tersebut perlu disikapi secara bijaksana bahkan dioptimalkan sebagai upaya menjaga marwah bangsa serta membawa Indonesia menuju puncak peradabannya. We’u memaparkan bahwa “kemultikulturalan bangsa Indonesia merupakan fakta sosial yang tidak terbantahkan, sehingga masyarakat harus menghargai realita tersebut dengan penuh kesadaran, guna memperkuat ikatan persaudaraan, persatuan serta saling menghargai”. Nyatanya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam merubah paradigma atau cara pandang peserta didik, terhadap realita tersebut. Sehingga lumrah output dari pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultural adalah membentuk pemahaman peserta didik akan pentingnya menjaga keberagaman, persatuan, persaudaraan bangsa, yang didasari oleh sikap religius, nasionalisme, patriotisme, toleransi, serta saling menghargai dan menyayangi.

Pendidikan kewarganegaraan sangat relevan untuk berperan sebagai pendidikan multikultural. Selain didukung oleh tujuan serta struktur keilmuannya yang mengakomodir kepentingan dalam menjaga kemultikulturalan atau kemajemukan bangsa, guna meminimalisir praktik-praktik yang mengarah pada kekerasan, konflik SARA, penindasan

serta diskriminasi. Pendidikan kewarganegaraan pun memiliki posisi strategis dalam konstitusi serta kurikulum pendidikan nasional, yang disuratkan sebagai mata pelajaran serta mata kuliah wajib bagi peserta didik. Terlepas dari pendekatan serta strategi pembelajarannya, bahkan dari berbagai hambatan teknis yang terjadi selama proses pembelajaran atau yang terjadi di lapangan, nyatanya pendidikan kewarganegaraan telah memenuhi kriteria untuk dimandatkan sebagai pendidikan multikultural.

Idealnya dalam upaya memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta didik mengenai pentingnya menjaga kemultikulturalan bangsa. Tentu perlu memenuhi ketiga aspek penting pembelajaran, yang berpusat pada ranah kognitif, afektif serta psikomotorik. Dengan orientasi memberikan pemahaman yang baik, sehingga peserta didik dengan sukarela serta penuh tanggung jawab, berperan untuk menerima serta turut menjaga realita Indonesia sebagai bangsa yang multikultural. Bukan bermaksud untuk memberikan doktrin atau dogma, yang menghilangkan sikap kritis serta pemikiran orisinal peserta didik. Tetapi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif serta kontekstual mengenai realita keberagaman bangsa, sehingga peserta didik mampu diakomodir rasa keingintahuannya, serta bertindak sesuai pemahaman yang dimilikinya.

Faktanya pendidikan multikultural merupakan kajian yang bertujuan untuk memberikan rasionalisasi guna menerima perbedaan sosial, khususnya yang bersifat agama, ras, budaya, serta gender, guna mewujudkan kedamaian dan keadilan, serta untuk menghindari diskriminasi, stigma negatif mengenai mayoritas dan minoritas, bahkan konflik horizontal. Dwintari mengungkapkan bahwa “pendidikan kewarganegaraan berbasis multikultural merupakan kajian yang berfokus pada usaha dalam menginternalisasikan prinsip-prinsip kemultikulturalan kepada peserta didik, agar menjadi warga negara yang religius, demokratis, toleran, menghargai keberagaman serta bertanggung jawab”. Nyatanya kedua konsep keilmuan tersebut, memiliki karakteristik yang mirip, khususnya pada tujuan eksplisit serta materi pembelajarannya. Sehingga yang menjadi problematika serius adalah kondisi mengenai pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, moralitas kaum pendidik terhadap kemultikulturalan bangsa, serta kesadaran peserta didik itu sendiri.

Pada aspek kognitif, pendidikan kewarganegaraan harus mampu memenuhi rasa penalaran peserta didik terhadap konsep, pendekatan, serta makna pendidikan multikultural. Basri menjelaskan bahwa “kognitif merupakan keterampilan yang berbasis otak, akal atau pikiran yang membantu peserta didik untuk menyelesaikan berbagai tugasnya dari taraf sederhana sampai yang paling kompleks”. Faktanya idealisme mengenai peran keilmuan pendidikan kewarganegaraan dalam memenuhi keingintahuan peserta didik terhadap substansi serta materi kemultikulturalan sangatlah penting, karena sebagai modal akademik peserta didik untuk mengetahui, menelaah, menganalisis, bahkan mengevaluasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kemultikulturalan bangsa. Ringkasnya bagaimana peserta didik bersedia untuk menerima keberagaman, apabila mereka tidak memiliki pemahaman mumpuni secara teoritik mengenai kemajemukan serta tidak mengetahui praktik atau perilaku yang mendukung kemultikulturalan bangsa agar tetap terjaga.

Pada aspek afektif, lebih berfokus pada watak, nilai atau sikap, yang mana aspek tersebut sangat menentukan bagi peserta didik untuk mengaplikasikan cara pandangnya terhadap kemultikulturalan bangsa Indonesia. Dinatha mengungkapkan bahwa “afektif merupakan penilaian terhadap watak serta perilaku, seperti sikap, nilai dan moral, konsep diri dan minat”. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultural harus mampu merubah cara sikap serta penilaian peserta didik terhadap fenomena

kemultikulturalan, tanpa paksaan, tetapi melalui penginternalisasian nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, karena pada dasarnya nilai-nilai tersebut menerima serta menjaga fenomena kemajemukan bangsa. Pada konteks watak serta sikap, tentu idealnya perlu merepresentasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 tersebut, bukan hanya sebatas penerimaan nilai saja, tetapi juga menyentuh ranah praktis dalam kehidupan peserta didik sehari-hari.

SIMPULAN

Realita Indonesia sebagai bangsa yang multikultural merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita perlu menerima bahkan merawat kemultikulturalan tersebut dengan penuh komitmen dan kesadaran. Tentu sikap tersebut membuktikan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, serta merepresentasikan warga negara yang baik dan cerdas. Pendidikan kewarganegaraan sangat relevan untuk berperan sebagai pendidikan multikultural. Selain didukung oleh tujuan serta struktur keilmuannya yang jelas berfokus pada upaya untuk menjaga kemultikulturalan atau kemajemukan bangsa, guna meminimalisir praktik-praktik yang mengarah pada ketidakadilan, kekerasan, konflik horizontal, penindasan serta diskriminasi. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultural pun memberikan landasan teori serta informasi argumentatif agar peserta didik memiliki pemahaman mumpuni mengenai filosofi, substansi serta pentingnya menjaga kemultikulturalan bangsa. Sehingga secara sukarela mengaplikasikan pemahamannya tersebut dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Dalam kapasitasnya sebagai pendidikan nilai dan moral, pendidikan kewarganegaraan memiliki orientasi serta kompetensi keilmuan yang mumpuni untuk menginternalisasikan nilai-nilai terpuji kepada peserta didik, serta membentuk moralitasnya, sehingga memiliki semangat yang merepresentasikan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Moralitas yang dicita-citakan melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultural adalah mampu membentuk peserta didik yang mengutamakan integrasi nasional, menjaga kedamaian masyarakat, serta melestarikan nilai dan budaya yang hidup dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budimansyah, D. dan Suryadi, K. *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, 2019.
- Charles. "Pendidikan Multikultural untuk Memperkuat Kohesifitas Persatuan dan Kesatuan Bangsa." *Jurnal Educative: Journal of Educational Studies*. Vol. 2 No. 1 (n.d.).
- Dellawati et al. "Konsep Pendidikan Perempuan Perspektif Raden Ajeng Kartini dan Rahma El-Yunusiyah serta Relevansi Dengan Pendidikan Islam Kontemporer". *Hikmah*. Vol. 20 No. 2 (2023), h. 284–300.
- Fathurrosi. "Kesaktian Pancasila dalam Membangun Kesadaran dan Keamanan Bangsa Indonesia." *Nizham Journal of Islamic Studies*. Vol. 6 No. 1 (n.d.).
- Jamaludin, T. "Pilkada Langung: Kisah Sukses dan Problematika." *Jurnal Politik Walisongo*. Vol. 1 No. 1 (2019).

- Kariadi, D. "Revitalisasi NilaiNilai Edukatif Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Masyarakat Berwawasan Global Berjiwa Nasionalis.". *Jurnal PIPSI: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*. Vol. 1 No. 1 (n.d.).
- Shofwan, Arif Muzayin. "Kajian Konsep Pendidikan Multikultural dalam Islam". *Islamika*. Vol. 4 No. 1 (2022), h. 21-36. <https://doi.org/10.36088/islamika.v4i1.1490>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- We'u, G. "Urgensi Pendidikan Multikultural: sebuah Jawaban atas Problematika Pluralitas.". *JIPD: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*. Vol. 4 No. 2 (2020).
- Wibowo, A. P. & Wahono, M. "Pendidikan Kewarganegaraan: Usaha Konkret untuk Memperkuat Multikulturalisme di Indonesia.". *Jurnal Civicus*. Vol. 1 No. 2 (2019)